



BAB 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROIRITAS DAERAH DALAM RKPD PERUBAHAN

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menjadi ukuran seberapa besar kemampuan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. PDRB juga menjadi indikasi keuangan suatu daerah karena angka PDRB menjadi dasar dalam penentuan potensi pajak yang dapat diambil oleh pemerintah. Oleh karenanya, pembangunan daerah sering diarahkan untuk memicu peningkatan PDRB agar mampu meningkatkan keuangan daerah sekaligus mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek

3.1. ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1. *Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2015*

Perubahan kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan strategis untuk menggali potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Anggaran pembangunan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang



terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga dalam penetapan target pendapatan harus diestimasikan secara cermat dan berhati-hati karena dapat berdampak pada sisi anggaran belanja.

Perhitungan proyeksi bagi hasil yang mengalami kenaikan signifikan pada Perubahan APBD 2015 ini dari target murni adalah karena perbedaan cara perhitungan dalam menyusun target tersebut, dimana pada awalnya menggunakan formula pembagian antara Kaltim dan Kaltara dengan prinsip luas wilayah dan jumlah penduduk, dan dengan terbitnya Perpres 162 Tahun 2014 yang membagi DBH berdasarkan prinsip daerah penghasil sesuai penjelasan PP No. 55 Tahun 2005 (Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil), sehingga ada sejumlah dana yang kembali ke Provinsi Kalimantan Timur, yaitu yang semula mengurangi alokasi DBH Kaltim sebesar 30% menjadi hanya 3% berdasarkan potensi daerah penghasil (khususnya pada DBH SDA Pertambangan Umum dan Migas).

Lepasnya potensi dari Wilayah Kalimantan Utara, penurunan penjualan unit kendaraan bermotor baru dibanding penjualan kendaraan tahun 2014, penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2015, berkurangnya daya beli masyarakat, turunnya harga batu bara yang sangat signifikan, penurunan penjualan BBM Industri di sektor tambang mempengaruhi turunnya target pendapatan dari Pajak Daerah.

3.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Peningkatan target pendapatan perubahan tahun 2015 di dominasi oleh Penerimaan pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Penerimaan pendapatan diprediksi sebesar Rp.10.497.631.453.406,- bertambah sebesar Rp.1.961.418.103.405,- atau naik 22,98 % dari target pendapatan tahun 2015 murni yaitu sebesar Rp.8.536.213.350.000 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.095.145.980.601,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.4.918.899.806.704,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.483.585.666.100,- serta Pembiayaan



Daerah sebesar Rp.1.036.628.546.594,-, sehingga total penerimaan daerah sebesar Rp.11.534.260.000.000,-.

Dana Alokasi Khusus mengalami penambahan sebesar Rp.210.000.000.000,- semula sebesar Rp.8.651.350.000,- menjadi Rp.218.651.350.000,- dibandingkan target APBD 2015. Sementara, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima alokasi tersebut.

Komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah khususnya komponen Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar Rp.735.517.000.000,- atau turun 15,75% dari target tahun 2015 murni sebesar Rp.4.669.869.000.000,- menjadi Rp.3.934.352.000.000,- pada perubahan tahun 2015. Demikian pula pada komponen penerimaan Retribusi Daerah, target tahun 2015 sebesar Rp.12.204.020.000,- meningkat sebesar Rp.940.728.900 atau naik 7,71% menjadi Rp.13.144.748.900 pada perubahan tahun 2015. Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.279.606.181.701,- atau naik 47,98% dari penerimaan tahun 2015 sebesar Rp.582.736.000.000,- menjadi sebesar Rp.862.342.181.701,- pada tahun anggaran perubahan 2015. Peningkatan Pendapatan pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.4.122.500.000,- atau 1,47% dari penerimaan tahun 2015 sebesar Rp.281.184.550.000,- menjadi sebesar Rp.285.307.050.000,- pada tahun Anggaran Perubahan 2015.

A. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari PAD yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan perubahan PAD tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.5.095.145.980.601,-, menurun sebesar sebesar Rp.450.847.589.398,- atau turun 8,13% dari target Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun 2015 sebesar Rp.5.545.993.570.000,-.

a. Pajak Daerah

Penerimaan tahun 2015 perubahan dari komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.3.934.352.000.000,-, turun sebesar Rp.735.517.000.000,- atau turun 15,75% dari target penerimaan tahun 2015 Murni yaitu Rp.4.669.869.000.000,-. Penurunan target Pajak Daerah tersebut



bersumber dari semua komponen jenis penerimaan Pajak Daerah kecuali Pajak Rokok, dan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Pajak Daerah Nomor 01 tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target penerimaan PKB APBD Murni TA 2015 sebesar Rp.745.730.000.000,- dan pada Target PKB APBD-P TA 2015 sebesar Rp.730.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.15.730.000.000,- atau turun 2,11%. Pengaruh penetapan target tersebut dipengaruhi oleh:

1. Lepasnya potensi dari Wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp.50.730.000.000,- yang terdiri dari 135.054 unit kendaraan bermotor ulang dan 17.600 unit kendaraan bermotor baru.
2. Adanya penambahan estimasi penjualan kendaraan bermotor di 9 (sembilan) wilayah UPTD sebesar 203.000 Unit kendaraan baru dengan asumsi untuk penetapan pendapatan.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah sebagai faktor penghitung Pajak Kendaraan Bermotor baik untuk kendaraan ulang, terjadi penurunan melalui Permendagri (NJKB No. 101 tahun 2014) dan tarif sebagai faktor pengali diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011.
4. Adanya penambahan penerimaan PKB khusus Kalimantan Timur diluar Kalimantan Utara dikarenakan seluruh pelayanan publik yang berbasis IT dibangun telah berfungsi secara optimal di Kantor UPTD/SAMSAT/SAMSAT Pembantu di 9 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan semakin efektifnya penanganan Pajak Progresif.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pendataan kendaraan bermotor, operasional/razia lapangan khususnya Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Besar.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Target murni tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.078.060.000.000 dan pada target perubahan sebesar Rp.810.000.000.000, Mengalami penurunan



sebesar Rp.268.060.000.000, atau (24,87%). Pengaruh penurunan tersebut karena:

1. Lepasnya potensi dari Wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp.83.060.000.000,-
2. Terjadi penurunan penjualan unit kendaraan bermotor baru dibanding penjualan kendaraan tahun 2014 hal ini dapat dilihat dari penjualan triwulan pertama di tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 50% dibanding penjualan triwulan 1 tahun 2014
3. Penambahan penjualan kendaraan bermotor di 9 (sembilan) wilayah UPTD sebesar 203.000 Unit dengan asumsi penerimaan BBNKB sebesar Rp.920 Milyar
4. Penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11 %dibanding Tahun 2014 dan pemberian stimulus PKB Angkutan Umum sebesar 30% dari Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
5. Berkurangnya daya beli masyarakat karena situasi ekonomi makro dan kondisi politik.
6. Turunnya harga batu bara yang sangat signifikan, yang mengakibatkan pembelian kendaraan bermotor baru sangat berkurang khususnya alat berat/besar.
7. Mekanisme pemungutan BBNKB dan PKB Alat berat masih belum melalui mekanisme Samsat, sehingga dapat menghambat proses pendataan maupun pemungutan BBNKB dan PKB Alat Berat.
8. Isu-isu strategis yang mempengaruhi : Kebijakan Pemerintah Pusat, Daerah, Nilai tukar rupiah terhadap mata uang US Dollar dan kondisi perekonomian (Dunia Usaha) Regional, Nasional dan Internasional.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Target tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.691.148.000.000,- dan pada target APBD perubahan tahun 2015 sebesar Rp.2.240.000.000.000,-



mengalami penurunan sebesar Rp.451.148.000.000,- atau 16,76% dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Hilangnya potensi dari Wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp.200 Milyar.
2. Adanya peningkatan penjualan BBM untuk jenis Premium, Solar, Biio Solar, Pertamina dan Pertamina Dex dengan estimasi peningkatan sebesar 5% namun untuk Solar Industri yang merupakan komponen terbesar dari penerimaan PBBKB (55% dari distribusi seluruh jenis BBM) penjualannya mengalami penurunan sebesar 25% dari tahun 2014.
3. Menurunnya rencana penerimaan pada APBD Perubahan 2015 dibandingkan realisasi Tahun 2014 disebabkan melemahnya Iklim Investasi Usaha khususnya di Sektor Tambang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagai sarana vital penggerak kegiatan tambang.
4. Menurunnya penggunaan BBM Solar Industri di sektor tambang sebesar 25% dibandingkan tahun 2014 dikarenakan banyaknya perusahaan tambang batubara yang tutup dan menurunnya jumlah produksi batubara.

4) Pajak Air Permukaan

Target murni tahun 2015 sebesar Rp.6.579.000.000 dan pada target APBD perubahan sebesar Rp.6.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.579.000.000,- atau 8.80%, Penurunan penerimaan PAP tersebut dipengaruhi oleh :

1. Keluarnya potensi dari wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp.579.000.000 dimana pajak Air permukaannya memiliki potensi sebesar 9% dari target APBD Murni 2015.
2. Faktor pengali pada tarif NPA masih relatif kecil rata-rata per kubik hanya Rp.100,-, sehingga potensi tidak mempengaruhi nilai penerimaan, akan dikaji kembali penetapan tarif untuk meningkatkan nilai perolehan air untuk mendongkrak penerimaan air permukaan.

5) Pajak Rokok

Target tidak mengalami perubahan.



b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen penerimaan yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Target pendapatan Tahun Anggaran 2015 Murni dari komponen Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.5.797.800.000,- sedangkan APBD perubahan 2015 sebesar Rp.6.888.764.000,- naik sebesar Rp.1.090.964.000 atau naik 18.82%.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Target pendapatan TA. 2015 Murni dari komponen Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.6.220.160.000,- sedangkan untuk APBD Perubahan TA. 2015 ditetapkan sebesar Rp.5.611.984.900,- terjadi penurunan sebesar Rp.608.175.100,- atau turun 9.78%.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Target pendapatan Tahun Anggaran 2015 Murni dari komponen Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.186.060.000,00 sedangkan untuk target pendapatan APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp.644.000.000,- secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp.457.940.000,- atau naik 246,12%. Peningkatan ini dikarenakan adanya penerimaan retribusi baru yaitu retribusi perpanjangan IMTA.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Milik swasta :

1) Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Prov Kaltim, Target yang ditetapkan pada APBD 2015 Murni sebesar Rp.700.000.000 tidak mengalami perubahan pada APBD Perubahan tahun 2015.

2) Perusda Kehutanan Prov. Kaltim.

Target yang ditetapkan pada APBD 2015 Murni sebesar Rp.36.000.000,- tidak mengalami perubahan pada APBD Perubahan tahun 2015.



3) PT. Agro Kaltim Utama

Target yang ditetapkan pada APBD 2015 Murni sebesar Rp.843.000.000,- sedangkan untuk target pendapatan APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp.300.000.000,- mengalami penurunan Rp.543.000.000,- atau turun 64,41%.

4) Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera Prov. Kaltim

Terdapat kenaikan target pendapatan sebesar Rp.4.5 miliar yang semula pada APBD 2015 sebesar Rp.18.000.000.000,- menjadi Rp.22.500.000.000,- pada Rancangan P-APBD TA. 2015 yang dikarenakan adanya peningkatan produksi PT Mahakam Sumber Jaya.

5) Bank Pembangunan Daerah

Target pada R APBD P 2015 tidak berubah dari APBD murni 2015 yaitu sebesar Rp.252.671.940.000,-.

6) Perusda Ketenagalistrikan

Terjadi penurunan terget pendapatan sebesar Rp.256.500.000,- dari target murni APBD 2015 sebesar Rp.1.100.000.000,- menjadi Rp.843.500.000,- pada Rancangan P-APBD TA. 2015 dikarenakan adanya investasi pada KIPi Maloy.

7) PT. Migas Mandiri Pratama

Bidang Usaha meliputi Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan Penunjang lainnya. PT. Migas Mandiri Pratama menaikkan target pada Rancangan P-APBD TA. 2015 menjadi Rp.4.750.000.000 dari target APBD 2014 sebesar Rp.4.500.000.000,- atau naik sebesar Rp.250.000.000,- atau 5,56% dikarenakan meningkatnya usaha pada hilir migas.

d. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga

Bagi Laba atas penyertaan modal pada pihak ketiga :

- 1) Parkir Mall Lembusuana, target yang ditetapkan pada APBD Murni tahun 2015 sebesar Rp.533.610.000,-, tidak mengalami perubahan pada APBD perubahan tahun 2015.
- 2) PT.Asuransi Bangun Askirinda, Target yangditetapkan pada APBD Murni Tahun 2015 Rp.2.800.000.000,-, mengalami penambahan pada



APBD Perubahan Tahun 2015 Rp.2.972.000.000,- sehingga bertambah Rp.172.000.000,- atau naik 6,4%.

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, mengalami kenaikan semula pada APBD 2015 sebesar Rp.3.500.000.000 menjadi Rp.4.000.000.000 pada APBD Perubahan 2015. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penghapusan aset barang milik daerah pada tahun 2014.

2) Penerimaan Jasa Giro,

Penerimaan Jasa Giro, mengalami penurunan semula APBD Murni 2015, Rp.5.000.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan 2015 menjadi Rp.4.068.424.073,-. penurunan sejumlah Rp.931.575.926,17,- atau turun 18.63%.

3) Penerimaan Bunga Deposito,

Penerimaan Bunga Deposito mengalami peningkatan semula Rp.126.351.000.000,- menjadi Rp.132.912.636.984,33,- kenaikan sejumlah Rp.6.561.636.984,33,- atau sebesar 5.19 %. Hal ini disebabkan karena dana deposito dari Pemerintah Provinsi yang cukup besar dan lamanya mengendap pada Kas Daerah.

4) Penerima TP/ Tuntutan Ganti Rugi,

Penerimaan TP/Tuntutan Ganti Rugi tahun APBD Murni Tahun 2015 sebesar Rp.7.000.000,- tidak mengalami perubahan pada APBD perubahan 2015.

5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2015 berdasarkan APBD murni Rp.1.500.000.000,-, tidak mengalami perubahan pada APBD perubahan.



6) Penerimaan Denda Pajak,

Penerimaan denda Pajak meningkat sebesar Rp.41.647.542.500,-, semula pada APBD Murni 2015 Rp.10.000.000.000,- menjadi Rp.51.647.542.500,- pada perubahan R APBD 2015. Hal ini disebabkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Kondisi demikian menyebabkan meningkatkannya pendapatan dari denda pajak

7) Penerimaan Denda Retribusi

Penerimaan Denda berdasarkan APBD Murni Tahun 2015 sebesar Rp.26.000.000,- tidak mengalami perubahan pada APBD perubahan Tahun 2015.

8) Penerimaan Dari Pengembalian

Penerimaan dari Pengembalian berdasarkan APBD murni tahun 2015 Rp.5.000.000.000,-, mengalami peningkatan sebesar Rp.70.000.000.000,- sehingga target pada perubahan R APBD 2015 menjadi Rp.75.000.000.000,-

9) Penerimaan BLUD

Kenaikan harga obat mempengaruhi kenaikan target pada penerimaan BLUD semula sebesar Rp.431.352.000.000,- pada APBD Murni 2015 menjadi sebesar Rp.593.180.578.143,- naik sebesar Rp.161.828.578.143,- atau 37,52%

B. Dana Perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Target murni tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.290.000.000.000,- dan pada target perubahan sebesar Rp.403.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.113.000.000.000 atau naik sebesar 38,97%. Hal ini disebabkan adanya penambahan penerimaan PBB sektor Pertambangan khususnya penerimaan PBB onshore Migas.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasil Pph 21, Pph Badan

Penerimaan DBH Pph pada APBD tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.378.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.23.000.000.000,- sehingga



target perubahan R-APBD 2015 ditetapkan sebesar Rp.355.000.000.000,-. Proyeksi PPh pada perubahan R-APBD 2015 ini mengalami penurunan karena memperhitungkan realisasi tahun 2014 yang mengalami pemotongan dana transfer DBH Pph sebesar Rp.10,039,170,124.00 sebagai kompensasi lebih salur pada tahun 2013 dan penyerapan anggaran belanja honorarium pegawai yang tidak optimal.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Perkiraan Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari penerimaan PSDH, IIUPH, Landrent, Royalty, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk perubahan R-APBD TA. 2015 menurut Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.3.942.248.456.704,83 naik sebesar Rp.2.052.193.971.704,83 atau naik 108,58% dibandingkan APBD 2015 murni sebesar Rp.1.890.054.485.000,-

b. Dana Alokasi Umum

Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tahun 2015 tidak mendapatkan DAU dari Pemerintah Pusat, sehingga target yang telah ditetapkan sebesar Rp.57.312.515.000,- pada APBD Murni 2015 dinihilkan pada target perubahan R APBD 2015.

c. Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2015 dalam perubahan R-APBD TA. 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.210.000.000.000,- sehingga rencana penerimaan pada Perubahan R-APBD 2015 menjadi Rp.218.651.350.000,-

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terjadi perubahan dari target semula pada APBD 2015 murni sebesar Rp.366.201.430.000,-. Dan pada APBD Perubahan sebesar Rp.483.585.666.100,- mengalami kenaikan sebesar Rp117.384.236.100,- atau 32.05%.

1. Komponen Pendapatan Hibah dari pemerintah dimana APBD murni maupun APBD Perubahan tidak memiliki Alokasi.



2. Pendapat Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri :

a. Pendapatan Hibah

- 1) PT. Jasa Raharja, Pada APBD murni Tahun 2015 sebesar Rp.2.400.000.000,- dan mengalami peningkatan pada APBD Perubahan 2015 senilai Rp.2.500.000.000,- naik sebesar Rp.100.000.000,- atau 4,7%.
- 2) Sumbangan Pihak ke Tiga , Pada APBD Murni 2015 sebesar Rp.12.170.000.000,- selanjutnya pada APBD Perubahan 2015 mengalami penurunan menjadi Rp.12.054.866.100 atau menurun sejumlah Rp.115.133.900,- atau turun 0,95%.

b. Dana Bosnas

Dana Bosnas pada APBD Murni Tahun 2015 sebesar Rp.351.631.430.000,- dan pada APBD Perubahan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp.469.030.800.000,- sehingga total kenaikan anggaran senilai Rp.117.399.370.000,- atau naik 33,39%.

3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dilakukan melalui :

- a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset untuk meningkatkan pendapatan ;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan konsisten di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Teknis, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan, Unsur Pengawas Internal dan Eksternal;
- f. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.



Tabel 3.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
1	PENDAPATAN	8,536,213,350,000.00	10,497,631,453,406.00	1,961,418,103,405.99	22.98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,545,993,570,000.00	5,095,145,980,601.16	(450,847,589,398.84)	(8.13)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,669,869,000,000.00	3,934,352,000,000.00	(735,517,000,000.00)	(15.75)
1.1.2	Retribusi Daerah	12,204,020,000.00	13,144,748,900.00	940,728,900.00	7.71
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281,184,550,000.00	285,307,050,000.00	4,122,500,000.00	1.47
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	582,736,000,000.00	862,342,181,701.16	279,606,181,701.16	47.98
1.2	DANA PERIMBANGAN	2,624,018,350,000.00	4,918,899,806,704.83	2,294,881,456,704.83	87.46
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,558,054,485,000.00	4,700,248,456,704.83	2,142,193,971,704.83	83.74
1.2.2	Dana Alokasi Umum	57,312,515,000.00	-	(57,312,515,000.00)	(100.00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8,651,350,000.00	218,651,350,000.00	210,000,000,000.00	2,427.37
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	366,201,430,000.00	483,585,666,100.00	117,384,236,100.00	32.05
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,570,000,000.00	14,554,866,100.00	(15,133,900.00)	(0.10)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351,631,430,000.00	469,030,800,000.00	117,399,370,000.00	33.39

Sumber : Data Diolah Bappeda Prov. Kaltim

3.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

3.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Perubahan RKPD 2015 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan karena :

- Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun anggaran 2015 harus disesuaikan dalam tahun anggaran berjalan;
- Tambahan DAK dari Kementerian Keuangan RI (ditambah 10% Dana Pendamping);
- Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota (Hutang Bagi Hasil Tahun 2015 sesuai SK Gubernur No.140/K.88/2015 dan Atas Tambahan Pajak Daerah Tahun 2015)



- e. Belanja BLUD (Atas Tambahan Pendapatan BLUD 2015 dan SiLPA BLUD Tahun 2015)
- f. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS.
- g. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
- h. Pembiayaan Pekerjaan Multiyears Contract (Kontrak Tahun Jamak)
- i. Pembayaran Retensi terhadap Kegiatan 2015
- j. Pembayaran Kegiatan Tahun 2015 sesuai dengan Pergub No. 71 Tahun 2013

Perubahan pokok-pokok kebijakan daerah mempunyai implikasi pada penurunan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjaga kredibilitas pelaksanaan APBD tahun 2015.

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja yang berimplikasi pada belanja daerah, baik pada alokasi terhadap berbagai belanja daerah maka anggaran Belanja Daerah dalam Rancangan P-APBD Tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp.11,464 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp.2,128 triliun dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2015 sebesar Rp.9,336 triliun atau bertambah sebesar 22,79%.

3.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Tidak Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

- 1) Penyesuaian Kekurangan Belanja Pegawai, Gaji dan Tunjangan PNS;
- 2) Pemenuhan Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota
- 3) Tambahan Bantuan Keuangan Pendidikan (Spesifik) kepada Kabupaten/Kota
- 4) Tambahan Hibah;

Dengan demikian, Belanja Tidak Langsung pada Rancangan RKPD P TA.2015 ditargetkan sebesar Rp.6,488 triliun, bertambah sebesar Rp.1.081 miliar atau naik 20,01% dari target Belanja Tidak Langsung tahun 2015 murni sebesar Rp.5,406 triliun dengan rincian sebagai berikut:



1) Belanja Pegawai

Dilakukan Penyesuaian Kekurangan Belanja Gaji dan Tunjangan sehingga keseluruhan Belanja Pegawai menjadi Rp.1,077 triliun, bertambah sebesar Rp.25,84 miliar atau 2,46% dari target tahun 2015 sebesar Rp.1,051 triliun.

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah akibat penambahan Hibah Bosnas dan Hibah umum sehingga bertambah sebesar Rp.383.40 miliar atau naik sebesar 62.75% dibanding pada APBD murni tahun 2015 sebesar Rp.610,966 miliar menjadi Rp.994,36 miliar.

3) Belanja Bantuan Sosial

Tidak ada perubahan pada Belanja Bantuan Sosial.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

Penambahan Belanja Bagi Hasil dilakukan atas berkurangnya Pajak Daerah Tahun 2015 dan dibayarnya kekurangan salur Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Kota sehingga Belanja Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota pada rancangan P-APBD bertambah sebesar Rp.412,97 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 16,77% dibanding pada APBD murni tahun 2015 sebesar Rp.2,461 triliun menjadi Rp.2,874 triliun.

5) Penambahan Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota & Partai Politik diakibatkan penambahan Dana Bosda dan insentif guru sehingga bertambah sebesar Rp.259,75 miliar atau naik sebesar 20,63% dibanding pada APBD murni tahun 2015 sebesar Rp.1,259 triliun menjadi Rp.1,519 triliun.

6) Belanja Tidak Terduga

Tidak ada perubahan pada Belanja Tidak Terduga.



3.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

Kebijakan terkait Kebijakan dan Prioritas Nasional adalah dilakukannya penyesuaian dana DAK sebesar Rp.210 miliar ditambah Dana Pendamping sebesar 10% sehingga Belanja Langsung DAK bertambah sebesar Rp.218,65 miliar dan anggaran 2015 murni sebesar Rp.8.65 milyar.

3.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

- a. Mengadminstrasikan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2014;
- b. Pembayaran Rentensi;
- c. Penambahan DAK ditambah dengan 10% Dana Pendamping;
- d. Kegiatan yang diusulkan dalam perubahan APBD mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran berjalan dan dapat diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 2015.
- e. Alokasi dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Sehingga Belanja Langsung SKPD pada Rancangan P-APBD 2015 bertambah sebesar Rp.1,046 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 26,91% dibanding pada APBD murni tahun 2015 sebesar Rp.3,929 triliun menjadi Rp.4,975 triliun.



Tabel 3.2
Pagu anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran 2015

No	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-RKPD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH /BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan	8,536,213,350,000	10,497,631,453,406	1,961,418,103,406
2	Belanja	9,336,213,350,000	11,464,259,999,998	2,128,046,649,998
2.1.	Belanja tidak langsung	5,406,872,865,000	6,490,135,393,840	1,083,262,528,840
	2.1.1. Belanja Pegawai.	1,051,166,430,000	1,077,007,434,622	25,841,004,622
	2.1.2. Belanja Subsidi	-	-	-
	2.1.3. Belanja Hibah.	610,966,430,000	999,156,400,000	388,189,970,000
	2.1.4. Belanja Sosial	5,500,000,000	5,500,000,000	-
	2.1.5. Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota	2,461,934,205,000	2,874,912,719,218	412,978,514,218
	2.1.6. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota	1,259,305,800,000	1,515,558,840,000	256,253,040,000
	2.1.7. Belanja Tak Terduga	18,000,000,000	18,000,000,000	-
2.2.	Belanja Langsung	3,929,340,485,000	4,974,124,606,158	1,044,784,121,158
	2.2.1. Belanja Pegawai	360,779,591,364	456,708,358,279	95,928,766,915
	2.2.2. Belanja barang dan Jasa	1,824,495,618,318	2,309,616,228,049	485,120,609,731
	2.2.3. Belanja Modal	1,744,065,275,318	2,207,800,019,830	463,734,744,512
	Surplus / Defisit	(800,000,000,000)	(966,628,546,592)	(166,628,546,592)

Sumber : Data diolah

3.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan P-APBD TA. 2015 sebesar Rp.1.036,63 miliar terdiri dari:

- 1) Realisasi SiLPA tahun 2014
- 2) SiLPA BLUD RSUD AWS Syahrane, RSUD. Kanujoso, UPTD Lab. Kes dan RSJ Atma Husada.

Dengan demikian Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp.236,62 miliar atau 29,58% menjadi Rp.1.036 triliun dibanding APBD Murni Tahun 2015 sebesar Rp.800,00 miliar.

**3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan P-APBD TA. 2015 akibat Penyertaan Modal Pemerintah kepada Bank Kaltim sebesar Rp.70,00 miliar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mengajukan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2015 yang didalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Tabel 3.3
Pagu anggaran sementara perubahan untuk Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	800,000,000,000	966,628,546,594	166,628,546,594
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	800,000,000,000	1,036,628,546,594	236,628,546,594
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	800,000,000,000	1,036,628,546,594	236,628,546,594
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	70,000,000,000	70,000,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	70,000,000,000	70,000,000,000
3.2.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (BLUD)	-	-	-

Sumber : Data Diolah Bappeda Prov. Kaltim



Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang secara langsung terkait dalam pencapaian RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, pada bab-bab sebelumnya.

3.4. BELANJA PEMERINTAH DAERAH MENURUT SKPD

Belanja Pemerintah daerah menurut SKPD penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Tabel 3.4
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Dinas Pendidikan	295,677,000,000.00	336,223,095,250.00	40,546,095,250.00
1.1	Dinas Pendidikan	274,829,939,000.00	315,376,034,250.00	40,546,095,250.00
1.2	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar	5,053,151,000.00	5,053,151,000.00	-
1.3	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	3,293,910,000.00	3,293,910,000.00	-
1.4	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	-
2	Dinas Kesehatan	59,007,000,000.00	72,526,647,944.96	13,519,647,944.96
2.1	Dinas Kesehatan	13,515,000,000.00	14,237,500,000.00	722,500,000.00
2.2	UPTD Laboratorium Kesehatan	6,505,000,000.00	6,505,000,000.00	-
2.3	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat	8,000,000,000.00	8,580,600,000.00	580,600,000.00
2.4	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	-
2.5	UPTD Akademi Keperawatan	5,100,000,000.00	5,173,000,000.00	73,000,000.00
2.6	UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi	18,987,000,000.00	28,987,000,000.00	10,000,000,000.00



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
2.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	2,400,000,000.00	4,543,547,944.96	2,143,547,944.96
3	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda	220,800,000,000.00	406,462,305,851.63	185,662,305,851.63
3.1	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	16,050,000,000.00	54,253,345,650.00	38,203,345,650.00
3.2	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)	204,750,000,000.00	352,208,960,201.63	147,458,960,201.63
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	154,600,000,000.00	272,117,199,460.55	117,517,199,460.55
4.1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	39,600,000,000.00	54,600,000,000.00	15,000,000,000.00
4.2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	115,000,000,000.00	217,517,199,460.55	102,517,199,460.55
5	RSUD. Tarakan	118,395,000,000.00	182,920,280,205.71	64,525,280,205.71
5.1	RSUD Tarakan di Tarakan	21,193,000,000.00	21,193,000,000.00	-
5.2	RSUD Tarakan di Tarakan (BLUD)	97,202,000,000.00	161,727,280,205.71	64,525,280,205.71
6	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	27,330,000,000.00	40,578,830,346.00	13,248,830,346.00
6.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	15,330,000,000.00	17,030,000,000.00	1,700,000,000.00
6.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	12,000,000,000.00	23,548,830,346.00	11,548,830,346.00
7	Dinas Pekerjaan Umum	1,630,988,000,000.00	2,086,550,824,760.00	455,562,824,760.00
7.1	Dinas Pekerjaan Umum	1,545,624,749,662.00	1,985,187,574,422.00	439,562,824,760.00
7.2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah	23,708,012,010.00	28,708,012,010.00	5,000,000,000.00
7.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur	23,882,934,980.00	23,882,934,980.00	-
7.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan	20,696,468,958.00	25,696,468,958.00	5,000,000,000.00
7.5	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara	17,075,834,390.00	23,075,834,390.00	6,000,000,000.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45,330,000,000.00	48,980,000,000.00	3,650,000,000.00
8.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45,330,000,000.00	48,980,000,000.00	3,650,000,000.00
9	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	15,205,000,000.00	16,905,000,000.00	1,700,000,000.00
9.1	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	15,205,000,000.00	16,905,000,000.00	1,700,000,000.00



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
10	Dinas Perhubungan	243,883,000,000.00	299,911,985,200.00	56,028,985,200.00
10.1	Dinas Perhubungan	223,352,700,000.00	279,231,685,200.00	55,878,985,200.00
10.2	UPTD SMK Pelayaran	14,870,150,000.00	15,020,150,000.00	150,000,000.00
10.3	UPTD Jembatan Timbang	5,660,150,000.00	5,660,150,000.00	-
11	Badan Lingkungan Hidup	16,114,000,000.00	16,114,000,000.00	-
11.1	Badan Lingkungan Hidup	16,114,000,000.00	16,114,000,000.00	-
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	9,450,000,000.00	9,450,000,000.00	-
12.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	9,450,000,000.00	9,450,000,000.00	-
13	Dinas Sosial	33,766,000,000.00	33,856,000,000.00	90,000,000.00
13.1	Dinas Sosial	17,530,000,000.00	17,620,000,000.00	90,000,000.00
13.2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
13.3	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda	1,831,000,000.00	1,831,000,000.00	-
13.4	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda	2,812,000,000.00	2,812,000,000.00	-
13.5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	-
13.6	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	-
13.7	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda	2,943,000,000.00	2,943,000,000.00	-
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42,296,000,000.00	42,344,000,000.00	48,000,000.00
14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30,758,000,000.00	30,806,000,000.00	48,000,000.00
14.2	UPTD Balai Pengembangan Produktivitas	4,379,000,000.00	4,379,000,000.00	-
14.3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	4,325,000,000.00	4,325,000,000.00	-
14.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	2,834,000,000.00	2,834,000,000.00	-
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	84,850,000,000.00	87,211,641,850.00	2,361,641,850.00
15.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	39,867,915,000.00	40,550,915,000.00	683,000,000.00
15.2	UPTD Metrologi	31,671,100,000.00	33,349,741,850.00	1,678,641,850.00
15.3	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	7,840,235,000.00	7,840,235,000.00	-
15.4	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM	5,470,750,000.00	5,470,750,000.00	-



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	15,000,000,000.00	15,421,000,000.00	421,000,000.00
16.1	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	15,000,000,000.00	15,421,000,000.00	421,000,000.00
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	90,145,000,000.00	114,089,247,319.00	23,944,247,319.00
17.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	34,177,000,000.00	40,677,700,000.00	6,500,700,000.00
17.2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya	20,620,000,000.00	21,395,000,000.00	775,000,000.00
17.3	UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	35,348,000,000.00	52,016,547,319.00	16,668,547,319.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,302,000,000.00	11,452,000,000.00	150,000,000.00
18.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,302,000,000.00	11,452,000,000.00	150,000,000.00
19	Kantor Satpol Pamong Praja	8,248,000,000.00	9,073,000,000.00	825,000,000.00
19.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	8,248,000,000.00	9,073,000,000.00	825,000,000.00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,961,000,000.00	14,049,400,000.00	88,400,000.00
20.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,961,000,000.00	14,049,400,000.00	88,400,000.00
21	Sekretariat Daerah	134,126,000,000.00	162,896,362,059.00	28,770,362,059.00
21.1	Biro Umum	37,543,000,000.00	50,492,152,909.00	12,949,152,909.00
21.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	12,110,000,000.00	15,610,000,000.00	3,500,000,000.00
21.3	Biro Hukum	4,737,000,000.00	5,537,000,000.00	800,000,000.00
21.4	Biro Organisasi	5,882,000,000.00	6,232,000,000.00	350,000,000.00
21.5	Biro Pemerintahan Umum	5,012,000,000.00	6,187,000,000.00	1,175,000,000.00
21.6	Biro Sosial	5,300,000,000.00	6,600,000,000.00	1,300,000,000.00
21.7	Biro Perekonomian	4,614,000,000.00	5,614,000,000.00	1,000,000,000.00
21.8	Biro Keuangan	16,390,000,000.00	17,935,209,150.00	1,545,209,150.00
21.9	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan	1,050,000,000.00	1,081,000,000.00	31,000,000.00
21.1	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-
21.11	Biro Pembangunan Daerah	6,253,000,000.00	7,253,000,000.00	1,000,000,000.00
21.12	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	6,525,000,000.00	7,325,000,000.00	800,000,000.00
21.13	Biro Perlengkapan	19,823,000,000.00	22,233,000,000.00	2,410,000,000.00
21.14	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	7,837,000,000.00	9,747,000,000.00	1,910,000,000.00
22	Sekretariat DPRD	66,602,000,000.00	68,007,000,000.00	1,405,000,000.00
22.1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	66,602,000,000.00	68,007,000,000.00	1,405,000,000.00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,084,000,000.00	17,037,000,000.00	1,953,000,000.00



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
23.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11,584,000,000.00	13,537,000,000.00	1,953,000,000.00
23.2	UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
24	Inspektorat Provinsi	10,474,000,000.00	11,224,000,000.00	750,000,000.00
24.1	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	10,474,000,000.00	11,224,000,000.00	750,000,000.00
25	Kantor Penghubung	9,000,000,000.00	9,758,000,000.00	758,000,000.00
25.1	Kantor Penghubung	9,000,000,000.00	9,758,000,000.00	758,000,000.00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24,064,000,000.00	24,064,000,000.00	-
26.1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24,064,000,000.00	24,064,000,000.00	-
27	Badan Kepegawaian Daerah	26,742,000,000.00	30,242,000,000.00	3,500,000,000.00
27.1	Badan Kepegawaian Daerah	26,742,000,000.00	30,242,000,000.00	3,500,000,000.00
28	Dinas Pendapatan Daerah	67,835,000,000.00	68,358,000,000.00	523,000,000.00
28.1	Dinas Pendapatan Daerah	16,101,440,000.00	16,505,440,000.00	404,000,000.00
28.2	UPTD Samarinda	7,550,150,000.00	7,550,150,000.00	-
28.3	UPTD Tenggarong	7,620,650,000.00	7,620,650,000.00	-
28.4	UPTD Melak	3,206,300,000.00	3,206,300,000.00	-
28.5	UPTD Sengata	3,771,546,000.00	3,840,546,000.00	69,000,000.00
28.6	UPTD Bontang	3,329,500,000.00	3,329,500,000.00	-
28.7	UPTD Balikpapan	6,160,060,000.00	6,210,060,000.00	50,000,000.00
28.8	UPTD Tanah Grogot	2,874,800,000.00	2,874,800,000.00	-
28.9	UPTD Penajam	3,255,130,000.00	3,255,130,000.00	-
28.1	UPTD Tarakan	2,564,850,000.00	2,564,850,000.00	-
28.11	UPTD Malinau	1,664,700,000.00	1,664,700,000.00	-
28.12	UPTD Nunukan	2,348,300,000.00	2,348,300,000.00	-
28.13	UPTD Tanjung Selor	2,081,600,000.00	2,081,600,000.00	-
28.14	UPTD Tanjung Redeb	3,211,494,000.00	3,211,494,000.00	-
28.15	UPTD Tideng Pale	2,094,480,000.00	2,094,480,000.00	-
29	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	22,480,000,000.00	24,620,000,000.00	2,140,000,000.00
29.1	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	18,432,741,500.00	20,517,741,500.00	2,085,000,000.00
29.2	UPTB Balai Pelatihan Pertanian	4,047,258,500.00	4,102,258,500.00	55,000,000.00
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16,660,000,000.00	19,045,260,000.00	2,385,260,000.00
30.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16,660,000,000.00	19,045,260,000.00	2,385,260,000.00
31	Badan Arsip Daerah	8,566,000,000.00	8,566,000,000.00	-



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
31.1	Badan Arsip Daerah	8,566,000,000.00	8,566,000,000.00	-
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,481,000,000.00	28,788,973,821.00	3,307,973,821.00
32.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,481,000,000.00	28,788,973,821.00	3,307,973,821.00
33	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2,576,000,000.00	3,076,000,000.00	500,000,000.00
33.1	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2,576,000,000.00	3,076,000,000.00	500,000,000.00
34	Badan Perpustakaan Daerah	10,826,000,000.00	11,035,400,000.00	209,400,000.00
34.1	Badan Perpustakaan	10,826,000,000.00	11,035,400,000.00	209,400,000.00
35	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	103,128,000,000.00	110,054,000,000.00	6,926,000,000.00
35.1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	75,989,000,000.00	81,989,000,000.00	6,000,000,000.00
35.2	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
35.3	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	3,266,000,000.00	3,466,000,000.00	200,000,000.00
35.4	UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija	3,656,000,000.00	3,806,000,000.00	150,000,000.00
35.5	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	4,438,000,000.00	4,464,000,000.00	26,000,000.00
35.6	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	3,779,000,000.00	4,329,000,000.00	550,000,000.00
36	Dinas Perkebunan	40,285,000,000.00	41,935,000,000.00	1,650,000,000.00
36.1	Dinas Perkebunan	35,055,000,000.00	36,705,000,000.00	1,650,000,000.00
36.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1,744,000,000.00	1,744,000,000.00	-
36.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1,736,000,000.00	1,736,000,000.00	-
36.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	-
37	Dinas Peternakan	62,732,000,000.00	66,992,000,000.00	4,260,000,000.00
37.1	Dinas Peternakan	52,734,433,720.00	56,984,433,720.00	4,250,000,000.00
37.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	3,037,974,400.00	3,037,974,400.00	-
37.3	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api	6,959,591,880.00	6,969,591,880.00	10,000,000.00
38	Dinas Kehutanan	21,303,000,000.00	23,108,000,000.00	1,805,000,000.00
38.1	Dinas Kehutanan	9,519,141,000.00	9,681,141,000.00	162,000,000.00
38.2	UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Tengah	1,217,600,000.00	1,467,600,000.00	250,000,000.00
38.3	UPTD Planologi Kehutanan Samarinda	1,589,350,000.00	2,382,350,000.00	793,000,000.00
38.4	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda	1,318,750,000.00	1,318,750,000.00	-



NO	URAIAN	APBD 2015 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2015 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
38.5	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda	1,563,074,000.00	1,563,074,000.00	-
38.6	UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Selatan	1,568,800,000.00	1,668,800,000.00	100,000,000.00
38.7	UPTD Planologi Kehutanan Balikpapan	1,244,850,000.00	1,244,850,000.00	-
38.8	UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Timur	1,045,825,000.00	1,545,825,000.00	500,000,000.00
38.9	UPTD Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Utara	1,411,010,000.00	1,411,010,000.00	-
38.1	UPTD Planologi Kehutanan Tarakan	-	-	-
38.11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	824,600,000.00	824,600,000.00	-
39	Dinas Pertambangan dan Energi	54,399,000,000.00	54,399,000,000.00	-
39.1	Dinas Pertambangan dan Energi	54,399,000,000.00	54,399,000,000.00	-
40	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	22,559,000,000.00	26,480,667,091.00	3,921,667,091.00
40.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18,009,000,000.00	18,709,000,000.00	700,000,000.00
40.2	UPTD Taman Budaya	2,275,000,000.00	4,905,000,000.00	2,630,000,000.00
40.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"	2,275,000,000.00	2,866,667,091.00	591,667,091.00
41	Dinas Kelautan Dan Perikanan	48,071,485,000.00	48,201,485,000.00	130,000,000.00
41.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan	33,394,400,000.00	33,524,400,000.00	130,000,000.00
41.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	3,363,700,000.00	3,363,700,000.00	-
41.3	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	9,579,485,000.00	9,579,485,000.00	-
41.4	UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu	1,733,900,000.00	1,733,900,000.00	-
	TOTAL	3,929,340,485,000.00	4,974,124,606,158.85	1,044,784,121,158.85